

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN – PETUNJUK TEKNIS  
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.17, BD.2023, NO.17, LE SETDA KAB.SEMARANG : 159 HLM

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan, kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan Peraturan Bupati, Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali, sehingga Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan Peraturan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 40 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perpres No 112 Tahun 2013; Perpres No 26 Tahun 2009; Perpres No 96 Tahun 2018; Permendagri No 2 Tahun 2016; Permendagri No 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 8 Tahun 2016; Permendagri No 119 Tahun 2017; Permendagri No 7 Tahun 2019; Permendagri No 53 Tahun 2019; Permendagri No 95 Tahun 2019; Permendagri No 96 Tahun 2019; Permendagri No 102 Tahun 2019; Permendagri No 104 Tahun 2019; Permendagri No 108 Tahun 2019; Permendagri No 109 Tahun 2019; Permendagri No 57 Tahun 2021; Permendagri No 72 Tahun 2022; Permendagri No 73 Tahun 2022; Permendagri No 74 Tahun 2022; Permendikbud RI No 77 Tahun 2013; Perda No 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Semarang No 7 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Secara Daring; Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi; Jangka Waktu Pelayanan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan; Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital; Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Ketentuan Lain-Lain; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2023.
- Lampiran 21 Halaman.